





# Tak Miliki Kawasan Tertinggal, Dana Desa Dikurangi

Gianyar (Bali Post) -

Dana Desa untuk Kabupaten Gianyar tahun ini sebesar Rp 51,9 miliar atau menurun dibandingkan tahun lalu yang Rp 55 miliar. Penurunan Dana Desa lantaran Kabupaten Gianyar bersama Kota Denpasar tidak memiliki desa tertinggal. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Gianyar I Ketut Suweta, Jumat (26/1) kemarin.

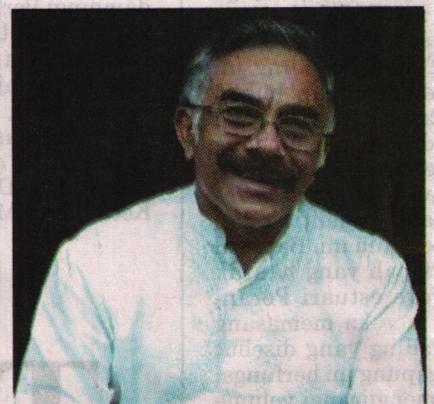
Suweta menjelaskan, untuk keseluruhan dana yang diarahkan ke desa nilainya mencapai Rp 184 miliar. Jumlah tersebut berasal dari empat sumber, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp 72 miliar lebih, Bagi Hasil Pajak Daerah Rp 53 miliar lebih, Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 5 miliar lebih dan Dana Desa sebesar Rp 51 miliar lebih. "Ada juga tambahan yang merupakan inovasi Bapak Bupati berupa Program Siaga Desa Swatantra sebesar Rp 300 juta per desa," katanya.

Dari empat sumber dana terse-

but, setiap desa memperoleh dana hampir Rp 2 miliar lebih. Namun ada beberapa desa yang memperoleh dan antara Rp 4 hingga Rp 5 miliar seperti Desa Pupuan, Tegallalang sebesar Rp 5,2 miliar dan Desa Taro yang total memperoleh dana mencapai Rp 4,4 miliar.

"Tingginya pengalokasian dana ini mempertimbangkan kepadatan penduduk. Misal di Desa Taro yang penduduknya padat, sampai belasan banjar," ungkapnya.

Ditambahkannya, selama ini pengelolaan dana di 64 desa di Kabu-



Bali Post/nik

**Ketut Suweta**

upaten Gianyar sudah baik. Bahkan pada 2017 lalu, dari Rp 55 miliar Dana Desa, 93 persennya sudah terserap dengan baik. "Serapan itu sudah tergolong tinggi dibandingkan

kabupaten lain," ujarnya

Guna memastikan dana-dana di desa dikelola dengan baik, pihaknya sudah rutin menggelar sosialisasi. Pemkab Gianyar juga membuka warung di kantor BPMD Gianyar yang khusus melayani aparat desa untuk berkonsultasi. "Kita juga buka aplikasi Siskudes (Sistem Keuangan Desa). Di sana ada barometer meminimalisir kesalahan, mempercepat penyaluran dana, sehingga bisa menuntun aparat desa," jelasnya.

BPMD Gianyar juga berkerja sama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar untuk ikut serta melakukan pengawasan Dana Desa. Sementara untuk sosialisasi, pihaknya bekerja sama langsung dengan Kementerian. "Dari kementerian, untuk Bali menggunakan Gianyar sebagai barometer pemanfaatan Dana Desa. Mungkin karena dianggap Gianyar paling bagus," ungkapnya. (kmb35)

Edisi : Sabtu, 27 Januari 2018

Hal : 9





## BUMDes Percepat Peningkatan Perekonomian Desa

Bangli (Bali Post) -

Pemkab Bangli melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangli terus berupaya mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiap desa. Pemkab menilai, keberadaan BUMDes sangat strategis dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Kepala DPMD Bangli I Dewa Agung Bagus Riana Putra, Minggu (28/1) kemarin mengungkapkan, pihaknya mencanangkan desa yang belum memiliki BUMDes agar ke depannya bisa membentuk BUMDes. Untuk membentuk BUMDes, masing-masing desa harus memperhatikan potensi wilayah. Desa jangan mengembangkan potensi yang tidak ada atau hanya sekadar ikut-ikutan desa lain.

"Jadi kita minta apa yang bisa digarap dan berpotensi di masing-masing desa supaya itu digerakkan. Kita berniat mendorong pembentukan sebanyak 20 BUM-

Des. Semoga nantinya bisa tercapai," ucapnya.

Riana Putra mengatakan, bagi desa-desa yang sudah memiliki BUMDes, pihaknya bakal ikut membantu mengembangkannya melalui Dana Desa. Dana Desa bisa digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

Saat ini di Bangli terdapat 48 BUMDes di mana empat di antaranya merupakan BUMDes bersama. Dalam pengembangan BUMDes, kata Riana Putra, banyak kendala yang dihadapi desa salah satunya SDM. Sejauh ini masih sangat sedikit masyarakat yang mau mengelola BUMDes lantaran sifatnya berupa pengabdian.

"Tetapi kita akan terus berupaya mengedukasi masyarakat desa terkait manfaat keberadaan BUMDes di desa. Karena kita harap dengan adanya BUMDes ini, perekonomian desa lebih cepat terangkat," kata Riana Putra. (kmb41)



Riana Putra

Bali Post/nan

Edisi : Jenin, 29 Januari 2018

Hal : 8



Soal Lelang Kegiatan

# Dewan Desak Pemkab Lakukan Percepatan

Semarapura (Bali Post)-

Kegiatan yang dirancang Pemkab Klungkung terealisasi tahun ini baru segelintir masuk Unit Lelang Pengadaan (ULP). Hal tersebut mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Sekretaris Komisi II DPRD Klungkung I Wayan Buda Parwata mendesak supaya ada langkah-langkah percepatan. "Proses ini harus cepat. Supaya kegiatan yang telah direncanakan pengerjaannya tidak molor," tegasnya, Minggu (28/1) kemarin.

Politisi Partai Hanura ini menyatakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berkaca dari 2017. Pasalnya, terdapat sejumlah kegiatan yang pengerjaannya molor bahkan gagal lelang. Hal ini secara otomatis menyebabkan adanya menundaan pemanfaatan oleh masyarakat.

"Perencanaan harus segera dituntaskan. Serahkan dokumen ke ULP untuk pelelangan," ungkapnya. Langkah percepatan pembangunan sudah terus dikampanyekan bupati. Namun, hal tersebut dinilai belum mendapatkan aksi gayung bersambut dari



Bali Post/sos

I Wayan Buda Parwata

OPD secara maksimal. Hal seperti ini menurutnya juga perlu dievaluasi. "Masa bupati sendiri yang berjalan cepat. Sedangkan bawahannya masih loyo kinerjanya. Malu dong. Ini harus jadi pertimbangan bupati dalam menilai kinerjanya," ucapnya.

Sesuai data per 26 Januari, yang masuk ke ULP, beberapa di antaranya, penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Blok A Pasar Semarapura yang pembangunannya dianggarkan Rp 11 miliar, penataan Lapangan

Puputan Klungkung senilai Rp 2.360.172.000. Selain itu adapula jasa pengoperasian layanan angkutan siswa senilai Rp 3,6 miliar dan sudah ada pemenang.

Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Klungkung Anak Agung Lesmana mengakui masih banyak yang belum masuk; seperti halnya pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral RSUD Klungkung yang dianggarkan Rp 20 miliar dan patung Ida Dewa Agung Jambe di Lapangan Puputan Klungkung. Belum lagi bidang Pekerjaan Umum yang kini dikabarkan masih tahap perencanaan dan survey bahan. "Yang masuk ULP baru sedikit. Ke-PU-an belum ada," sebutnya.

Ia pun menyebutkan sesuai rapat pada November 2017 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diharapkan supaya proyek sudah masuk ULP pada Januari, terlebih yang menelan anggaran cukup besar. Tujuannya supaya ada waktu untuk pelelangan ulang jika terjadinya kegagalan sebelumnya. (kmb45)

Edisi : Senin, 29 Januari 2018

Hal : 12





## Pemkab Klungkung Dukung UNBK Gelontorkan Ratusan Komputer

Semarang (Bali Post) -

Delapan SMP di Kabupaten Klungkung direncanakan menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini. Namun di balik itu, ketersediaan komputer masih menjadi persoalan. Menyikapi hal tersebut, pemkab menggelontorkan puluhan unit untuk setiap sekolah.

Sesuai data yang dihimpun, ujian tersebut rencananya diselenggarakan SMP Negeri 2 Semarang, SMP Negeri 1 Banjarnegara dengan jumlah peserta 353 siswa, SMP Negeri 2 Banjarnegara 177 siswa, SMP Negeri 1 Semarang 469 siswa, MTs Hasanudin 72 siswa, SMP Negeri 1 Dawan 249 siswa, SMP Negeri 2 Dawan dan SMP Negeri 1 Nusa Penida 172 siswa. Angka tersebut belum ideal dengan jumlah komputer yang dimiliki. "Untuk itu pemkab memberikan bantuan. Masing-masing 40 unit. Ini direncanakan sudah ada Februari. Yang penting sekolah siap dulu. Yang namanya pendidikan itu kan kerja sama, tidak bisa sendiri," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Dewa Gde Darmawan, Minggu (28/1) kemarin.



Bali Post/sos

**Dewa Gde Darmawan**

Jika dalam pelaksanaan nantinya ada sekolah yang tetap kekurangan komputer, pihaknya menegaskan bisa meminjam komputer (laptop) milik siswa, tentunya atas izin orangtua. Selain itu, pihak sekolah juga bisa meminjam komputer ke SMA penyelenggara UNBK. "Meminjam ke sekolah lain bisa. Kan ada zona UNBK," katanya.

Selain komputer, kestabilan jaringan internet, menurutnya, juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan ujian serempak tersebut. Terutama di wilayah Kecamatan Nusa Penida. Oleh karena itu, untuk di kawasan kepulauan itu hanya ada satu SMP yang menyelenggarakan yaitu SMP Negeri 1 Nusa Penida. "Kami sangat berharap ada kerja sama provider dalam ketersediaan jaringan internet yang memadai di sana," ucapnya.

Berdasarkan data terakhir, di Kabupaten Klungkung terdapat 21 SMP negeri. Hal itu menunjukkan masih ada belasan sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK tahun ini. "Kami terus berupaya setiap tahun ada penambahan penyelenggara," pungkasnya. (kmb45)

Edisi : Senin, 29 Januari 2018

Hal : 5





# Soal Penerima Bantuan Hibah "Ngutang" LPJ Kejari Turun Tangan

Semarang (Bali Post) -

Puluhan penerima bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan di Kabupaten Klungkung yang belum mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke pemkab mendapat atensi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Guna memastikan penggunaan dana yang pencairannya melalui APBD Perubahan 2017 itu, instansi penegak hukum ini akan turun melakukan monitoring dan evaluasi (monev).



Cakra Yuda

Bali Post/ist

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Klungkung Cakra Yuda mengungkapkan sejauh ini monitoring penggunaan dana tersebut baru dilakukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora). Sesuai informasi yang diterima, beberapa pelaksanaan kegiatan baru menyentuh sekitar 40 persen. Bahkan, ada yang belum berjalan. Padahal batas waktu penyeteroran LPJ-nya sudah berakhir.

"Dinas Kebudayaan sudah bersurat ke kami. Kami segera turun bersama inspektorat melakukan monev. Kalau memang ada pelanggaran, kan

ada proses lanjutannya lagi," ungkapnya, Minggu (28/1) kemarin. Cakra Yuda yang juga Ketua Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Klungkung menyebutkan penggunaan dana tersebut memang rawan penyelewengan. Sebelum pencairan, penerima sudah diberikan sosialisasi secara langsung yang juga melibatkan instansi di Pemkab. "Kami juga berharap masyarakat turut melakukan pengawasan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kadisbudpora Klungkung I Nyoman Mudarta menjelaskan bantuan tersebut

sudah dicairkan untuk 282 usulan dengan jumlah keseluruhan mencapai sekitar Rp 21 miliar. Laporan pertanggungjawaban penggunaannya harus sudah disetorkan ke pemkab paling lambat 10 Januari 2018. Namun, realitanya justru berbeda. Tercatat masih ada 64 yang "ngutang".

"Masih ada yang belum mengumpulkan sampai sekarang. Padahal sudah diminta paling lambat 10 Januari," sebutnya. Sesuai monev, kata pejabat asal Desa Tegak, Kecamatan Klungkung ini banyak yang belum merampungkan pembangunan. Parahnya lagi, beberapa juga masih jalan di tempat alias belum terealisasi. "Yang masih jalan itu baru rampung kisaran 40 persen. Ada juga yang belum jalan. Nilainya ada Rp 200 jutaan. Ada untuk pembangunan panyengker," sebutnya (kmb45)

Edisi : Senin, 29 Januari 2018

Hal : 12



## Pemkab Anggarkan Rp 524 Juta untuk Pelatihan Menjahit

Bangli (Bali Post)-

Berbagai terobosan dilakukan Pemkab Bangli melalui Dinas Sosial untuk menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya. Salah satunya dengan memberikan pelatihan menjahit kepada kepala keluarga (KK) miskin. Pelatihan ini bertujuan memberikan keterampilan agar KK miskin dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

Kasi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Dinas Sosial Bangli Dewa Putu Kantor Suriantara, Minggu (28/1) kemarin, mengungkapkan untuk program pelatihan tersebut pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp 524.716.000. Kegiatan berlangsung mulai Maret sampai Juli 2018 mendatang.

Meski sudah dianggar-

kan, namun pihaknya masih terkendala tempat lokasi penyelenggaraan. Tahun lalu pelatihan digelar di Museum Geopark, Kintamani. Tahun ini, untuk warga miskin di Kintamani rencananya tetap di Museum Geopark, sementara untuk warga dari tiga kecamatan yakni Bangli, Tembuku dan Susut, rencananya meminjam tempat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kayuambua, Susut dan Yayasan Bunga Bali. "Semoga diizinkan meminjam tempat untuk menggelar pelatihan itu," imbuhnya.

Dijelaskannya, dalam sekali pelatihan, diikuti sebanyak 50 orang. Peserta dibagi dalam tiga kelas. "Peserta sengaja tidak kita gabung. Karena kalau digabung semuanya akan sulit

mengingat instrukturnya sedikit. Jika sudah dibagi seperti itu, maka instruktur lebih mudah mengajari mereka menjahit. Waktu pelatihan kita berikan selama empat jam," paparnya.

Dalam pelatihan nanti, para peserta juga akan diberikan uang saku sebesar Rp 50 ribu per orang. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan bantuan berupa mesin jahit hingga benang dan jarum. Dengan begitu, pascamengikuti pelatihan mereka bisa langsung praktik.

Pihaknya berharap pelatihan ini nantinya mampu mengurangi angka kemiskinan di Bangli. Para peserta diharapkan mengimplementasikan keterampilan yang mereka dapatkan selama pelatihan dengan membuka usaha sendiri. (kmb41)



## Pemkab Gagal Kelola Galian C PAD Diperkirakan Defisit Rp 25 Miliar

### Amlapura (Bali Post) -

Sejak dulu, sektor tambang seperti galian C menjadi andalan Pemkab Karangasem untuk mendulang PAD. Akan tetapi, sejak Gunung Agung berstatus level IV atau Awas, pengelolaan potensi galian C menjadi kacau. Kebijakan membuat depo atau tempat penampungan juga tak berarti. Malah, di sana diduga terjadi praktik premanisme. PAD di awal tahun ini juga anjlok. Jika situasi ini terus berlanjut, PAD dari sektor galian C diperkirakan akan defisit Rp 25 miliar, dari target tahun ini Rp 55 miliar.

Situasi ini menjadi sorotan legislator di DPRD Karangasem. Situasi ini terungkap setelah adanya persoalan pada kebijakan pemerintah daerah terhadap pendirian depo, hingga membuat pengusaha galian maupun pengusaha armada truk hingga sopir, akhirnya protes. Sebagai contoh di Kecamatan Kubu. Penyebabnya, timbul kesan monopoli. Pengusaha yang tak tergabung di dalam pengelolaan depo, tak boleh mengambil atau membeli pasir di luar depo. "Kami tidak pernah mempersoalkan depo. Tetapi, yang menjadi masalah adalah melarang kami ambil pasir ke lokasi galian. Bahkan, lebih parah lagi melarang teman kami yang sopir lewat, kalau tidak ambil pasir di depo. Ini di Bali, masih ada praktik-praktik seperti ini," ungkap Nyoman Celos, pimpinan rombongan pengusaha asal Kubu, yang membawa persoalan ini ke

DPRD Karangasem, Senin (29/1) kemarin.

Dampak lebih serius dari persoalan ini adalah menurunnya PAD Pemkab Karangasem. Sebelum ada depo di Kubu, ada 400-500 unit truk yang ambil material per hari. Tetapi sekarang terjadi penurunan menjadi 130-150 truk per hari. Menurut Celos, penurunan ini terjadi, karena truk saat ini lebih memilih membeli pasir di Kintamani dan Banyuwangi. Sebab, selain adanya penghadangan mengambil material langsung ke lokasi galian C, harga di depo juga melambung tinggi mencapai Rp 1.300.000 per truk. Padahal, harga di lokasi galian hanya Rp 600.000 ribu per truk. "Ini kalau kita lihat ada kerugian bagi pemerintah daerah, karena pendapatan dari sektor pajak mineral bukan logam pasti menurun. Tetapi, kenapa keberadaan depo ini tak dievaluasi. Kenapa pemerintah daerah diam?" sorot Celos.

Sebagaimana penjelasan eksekutif, bahwa pendirian depo itu dulu hanya sebatas imbauan. Staf Ahli Pemkab Karangasem Wayan Sutapa juga menegaskan, pendirian depo dulu tujuannya agar pembangunan Bali tetap bisa berjalan, saat dulu status Awas Gunung Agung dengan radius berbahaya 12 km. Sebab, dulu dengan radius berbahaya 12 km, seluruh lokasi galian menjadi KRB (Kawasan Rawan Bencana). Sementara sekarang dengan penurunan radius berbahaya jadi 6 km, maka sepanjang

Edisi : Selasa, 30 Januari 2018

Hal : 13



Bali Post/gjk

**DEPO - Nyoman Celos (kiri) bersama perwakilan pengusaha yang tak ikut dalam pengelolaan depo, Nyoman Sudarsana, saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Karangasem.**

lokasi galian C di luar radius berbahaya, seharusnya tak akan jadi masalah. "Depo itu dalam pengertian kami, sama seperti yang ada di Jalan Bypass Prof. LB Mantra. Hanya tempat penampungan. Ambil di sana boleh, tidak juga tak jadi masalah," tegas Sutapa.

Legislator dari Komisi I DPRD Karangasem Wayan Sumatra menilai adanya penurunan PAD karena menurunnya jumlah truk ke lokasi galian, harus disikapi serius. Pemerintah daerah harus hadir di situ untuk mencegah ini terus terjadi. Politisi PDI-P ini menegaskan, jika situasi ini terus terjadi, maka PAD dari sektor galian C hingga akhir triwulan IV nanti akan defisit cukup besar mencapai

Rp 25 miliar. "Target PAD dari galian C padahal sudah kita turunkan, dari dulu Rp 84 miliar menjadi Rp 55 miliar tahun ini. Kalau situasinya terus seperti ini, maka sampai Desember akan defisit Rp 25 miliar. Padahal, target sudah diturunkan Rp 30 miliar," tegasnya.

Dengan target Rp 55 miliar, maka minimal per bulannya BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) seharusnya bisa memperoleh PAD sektor galian C, sebesar Rp 4 miliar. Tetapi, untuk bulan Januari saja, sektor galian C hanya menyumbang Rp 1,9 miliar periode Januari ini.

Kondisi demikian diakui Kepala BPKAD Karangasem

Nengah Mindra. Saat mengklarifikasi fakta ini, hingga Minggu (28/1) lalu, jumlah truk ke Kubu hanya rata-rata 123 truk per hari. Tetapi, dia enggan menanggapi apakah situasi ini memang karena adanya status Awas Gunung Agung hingga berdirinya depo, atau ada sebab lain. Meski demikian, pihaknya menegaskan pemerintah daerah tak ada upaya monopoli. Sebab, depo didirikan atas kesepakatan pengusaha lokal setempat, agar sejalan dengan upaya kontinjensi pemerintah. Setelah adanya depo dan situasi terkini, radius berbahaya turun jadi 6 km, maka di sana berlaku mekanisme pasar. "Kami akan evaluasi," kata Mindra. (kmb31)

Edisi : Selasa, 30 Januari 2018

Hal : 13